

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS

NOMOR 211/DJPSDKP.2/TU.140/IV/2026

Yth : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Penyampaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Bulan Februari 2026
Tanggal : 03 April 2026

Sehubungan dengan kegiatan dan anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2026, bersama ini terlampir kami sampaikan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Bulan Februari 2026.

Demikian disampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**
Sunaryo

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen PSDKP
2. Direktur lingkup Ditjen PSDKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

OIS OCEAN
IMPACT
SUMMIT

KKP
2026
#GROWSTRONGER

EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS
UNTUK

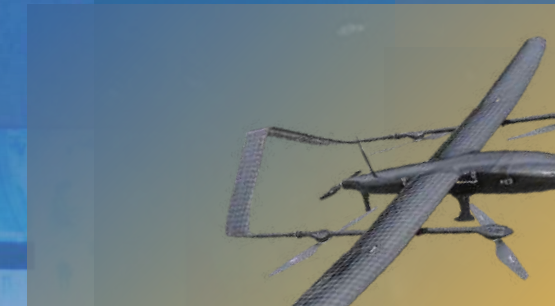
Laporan

KINERJA

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

BULAN FEBRUARI

2026

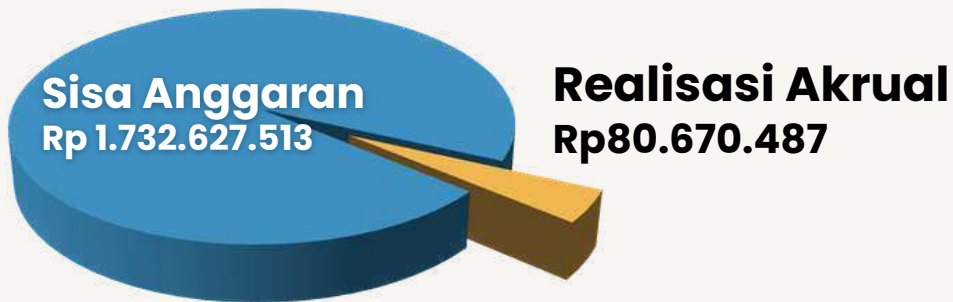




Realisasi Anggaran

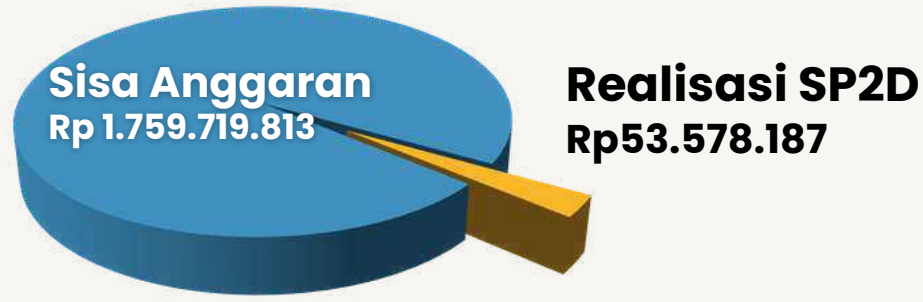


Realisasi Akrual



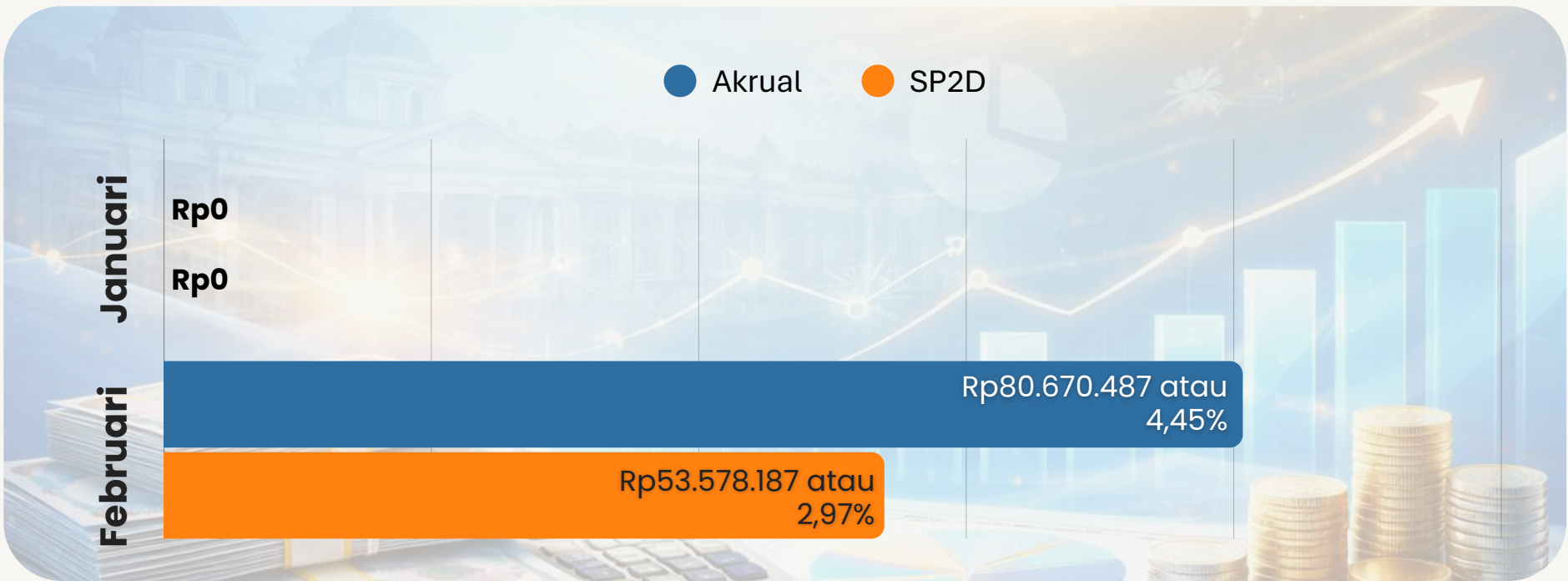
Realisasi Anggaran Akrual sampai dengan bulan Februari sebesar **Rp80.670.487** atau **4,45%** dari pagu efektif

Realisasi SP2D



Realisasi Anggaran SP2D sampai dengan bulan Februari sebesar **Rp53.578.187** atau **2,97%** dari pagu efektif

Realisasi Anggaran Direktorat PSP Januari – Februari 2026





Perkembangan Kegiatan MFISS

Koordinasi Persiapan Addendum Kegiatan MFISS



- **Gondan Consortium** mengajukan usulan *addendum* kegiatan MFISS yang terdiri dari: **1.** Perubahan tambah kurang pekerjaan *maritime intelligence system, secure data infrastructure, intelligence development fishing monitoring centre, development regional monitoring center*. **2.** Perubahan rencana penarikan anggaran dan *delivery timepoint* 1 (satu). **3.** Perubahan harga pengadaan *electronic intelligence* dan *communication intelligence* menjadi Dermaga Kapal Pengawas.
- Dalam rangka tertib administrasi dan keamanan terhadap dokumen MFISS, Tim Itjen hanya akan mengakses dokumen dalam bentuk fisik, sehingga akan dibuat SOP pengelolaan dokumen MFISS.

Koordinasi Pembangunan Kapal 60 meter



Desain Kapal

Referensi desain *superstructure* telah disetujui dengan catatan penghilangan *gangway* samping, penyesuaian posisi ruang VVIP, dan perbaikan tiang *mast* utama.



Sistem Pengawasan

PT. Bandar Abadi menyiapkan jalur CCTV, sementara perangkat alat akan disediakan oleh KKP.



Tindak Lanjut

- **PT. Bandar Abadi** wajib menyerahkan **approval drawing, S-Curve, network planning**, dan **maker list**.
- Akan dilakukan Koordinasi teknis di Batam

Penyelesaian Pembukuan Uang Muka Tahun 2025, Usulan Anggaran Tahun 2026 dan Penyusunan Manajemen Risiko

Penyelesaian Uang Muka



- Disepakati akan dilakukan revisi anggaran untuk menutup kekurangan uang muka Tahun 2025
- Penyelesaian revisi anggaran sebelum penutupan laporan keuangan
- Penyiapan pengusulan persetujuan kebutuhan anggaran Tahun 2026

Penyusunan Manajemen Risiko MFISS



Penyusunan Manajemen Risiko untuk memastikan kegiatan MFISS berjalan tepat waktu, sesuai spesifikasi teknis, dan pembayaran dilakukan sesuai nilai kontrak.

Perencanaan Prasarana dan Sarana



- Total 20 SOP Rendukbang
- 10 SOP sudah Validasi Biro SDMAO KKP
- 5 SOP on Proses Verifikasi Ortala PSDKP
- 5 SOP Akan di Agendakan Bulan Maret 2026

Usulan Kebutuhan PSP 2027



- Usulan Pengembangan PSP wajib memenuhi persyaratan dari Setneg
- Reposisi Usulan Pengembangan PSP dan perlu mendapatkan Persetujuan Dirjen PSDKP

Update Manual IKU Rendukbang



- Penyempurnaan Manual IKU dengan Perhitungan rumus terbaru yang disesuaikan dengan target Renstra PSDKP

Transfer Aset Sarana Pengawasan Bawah Air



- Transfer aset berupa 12 unit *Remotely Operated Vehicle* (ROV) kepada: 8 unit Dit. POA, 2 unit UPT Bitung, 1 unit UPT Batam, dan 1 unit UPT Benoa

Penyusunan Kepdirjen Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan



➤ **Konsistensi penamaan sarana pengawasan utama dan pendukung (sarana darat, air dan udara)**

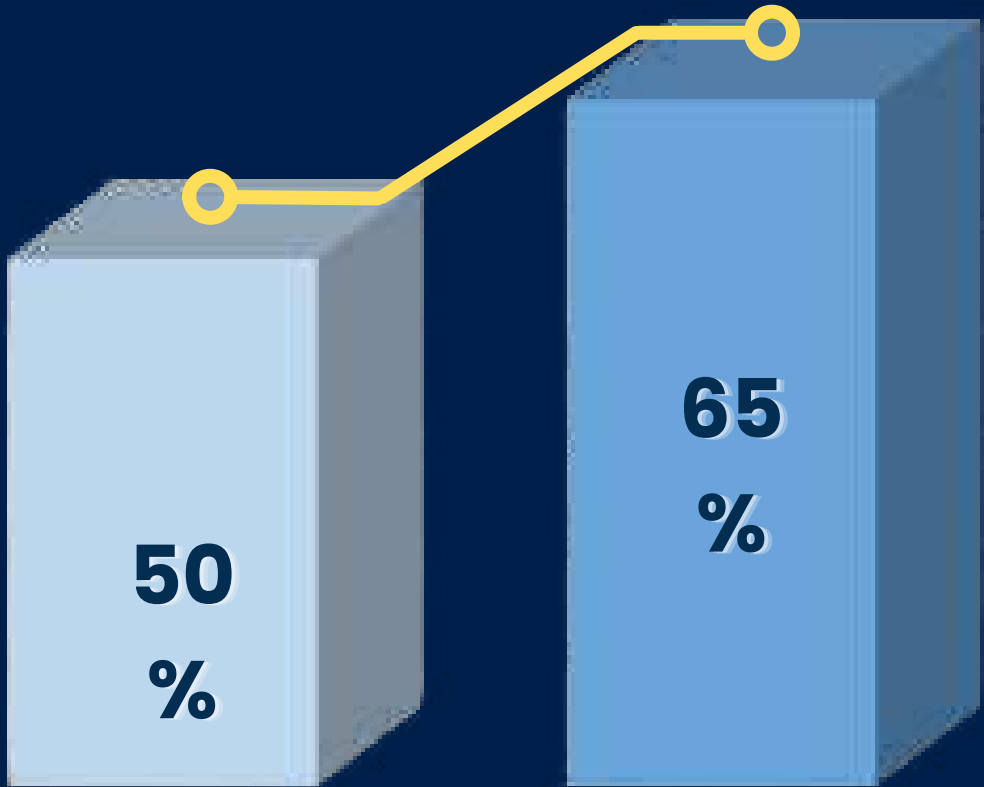
➤ **Reviu kriteria teknis sarana pengawasan darat dan air**



Target
100% (Triwulan III)



Capaian **65%**
(Per Februari 2026)



➤ **Penambahan tanda pada sarana pengawasan darat**



Kendaraan Angkut TPKP

Kendaraan Fungsional Pengawasan



➤ **Reviu kriteria prasarana pengawasan dengan menghapus kolam labuh dan tempat pembinaan rohani**



Pembahasan Usulan Persetujuan Menteri Sekretaris Negara Untuk Pembangunan Prasarana Pengawasan Tahun Anggaran 2026 – 2029



Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan rencana 2027–2029 dan sinkronisasi Renstra 2025–2029. Menghasilkan prioritas pada pemenuhan 6 dokumen standar hingga prototipe gedung.



Hambatan

Tindak lanjut percepatan pencairan anggaran. Terkendala antrean persetujuan dokumen Tata Ruang di Dinas PU (UPT Jakarta dan Biak).



Survei Lokasi Pembangunan Infrastruktur

Lokasi survei:
Natuna, Cilacap, Kupang, Ambon, Biak, Merauke

Rencana output:
Laporan *Pre-Feasibility Study* (Pre-FS)
dua kandidat lokasi



-  Survei fase 1
-  Survei fase 2
-  Survei fase 3

Rencana Pelatihan (TOR for *Training Seminar*)

"Improving Maintenance Capacity on Fisheries Surveillance Vessels"

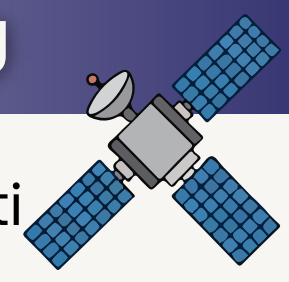


- Topik:**
- perawatan kapal
 - teknik interogasi dan
 - penanganan ilegal fishing.

Rencana pelaksanaan:
Juli 2026 di Jakarta

Penawaran Sistem Satelit SAR Jepang

Ditjen PSDKP dan Tim JICA menindaklanjuti pembahasan uji coba satelit SAR Jepang





Audiensi dan Tindak Lanjut Laporan

Tindak lanjut
laporan
Pokmaswas terkait
destructive fishing
dan pencemaran di
Kab. Simeulue

Share Learning Surveillance Pokmaswas
Sulawesi Selatan dan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas Pokmaswas
Kabupaten Simeulue

Pembinaan Pokmaswas
dengan DKP Prov.
Kalimantan Selatan

Audiensi DKP
Kab. Nias Utara

Audiensi DKP Prov. Sulawesi
Selatan

Audiensi DKP Prov. Banten



Penyusunan 7 SOP Pengembangan dan
Pembinaan Pokmaswas



Perawatan Aplikasi *Dashboard*
Pokmaswas

